

BAHASA POLITIK ISLAM DI INDONESIA

Ahmad Ali Riyadi*

Abstraks

Bahasa politik Islam mengindikasikan dedikasi terhadap keagamaan yang merupakan wacana yang berkembang sebagai bentuk ekspresi politik Islam. Penggunaan bahasa agama ke dalam bahasa politik Islam berasal dan bersumber dari sejarah politik Islam di awal-awal munculnya Islam, yakni ekspresi keagamaan dan politik Nabi Muhammad yang selanjutnya diikuti oleh Khulafaurrasyidun. Pelan tapi pasti bahasa ini berkembang dan kemudian memisahkan diri dari bahasa agama. Walaupun demikian, banyak kasus terjadinya hubungan dialektika antara bahasa agama dan politik yang kadangkala sistem dan perilaku politik yang dijalankan tidak selaras dengan prinsip dasar ajaran Islam, tidak jarang penguasa muslim menggunakan dan memanfaatkan bahasa politik dengan memberinya muatan aura keagamaan, sehingga penguasa dapat memperoleh dukungan legitimasi dan otoritas keagamaan yang sering dipandang sakral oleh khalayak muslim.

Kata-kata kunci; *bahasa, politik dan Islam*

Pendahuluan

Pada tahun 1998, serangkaian peristiwa terjadi di Indonesia. Peristiwa-peristiwa ini mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan yang mendasar, tidak saja dalam pemerintahan melainkan juga dalam keseluruhan aspek pola pikir masyarakat negara ini. Perubahan yang terjadi telah melampaui batas kemampuan negara. Para sejarawan menyebutnya sebagai orde reformasi. Tuntutan perubahan reformasi ini mengandaikan suatu perubahan total, baik dalam aspek politik maupun aspek peraturan kerakyatan. Dalam aspek politik terjadi tuntutan kebebasan pada rakyat untuk menentukan aspirasi politik yang tidak

* Dosen Universitas Darul Ulum Jombang

dibatasi oleh kekuasaan penguasa, sehingga mengakibatkan munculnya berbagai macam partai-partai politik berbasis masa dan berideologi Islam. Pada aspek kemasyarakatan munculnya tuntutan hak pengelolaan daerah yang lebih tinggi dari kekuatan penguasa, yang lebih dikenal dengan otonomi daerah.

Jargon reformasi juga mengekspresikan momentum penting dengan jatuhnya rezim diktator Orde Baru yang ditandai dengan munculnya semangat Islam untuk bangkit. Semangat kebangkitan Islam ini ditandai dengan kemunculan berbagai organisasi sosial gerakan Islam, seperti Front Pembela Islam (FPI), Laskar Jihad, Ahlussunnah Wal Jama'ah, Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin dan Majelis Mujahidin. Semangat ormas Islam ini berimbas pada pentas politik nasional yang semakin diramaikan dengan tuntutan aspirasi Islam dengan menjamurnya partai-partai politik berbasis Islam, seperti PKS (Partai Keadilan Sejahtera), PAN (Partai Amanat Nasional), PMB (Partai Matahari Bangsa), PKB (Partai Kebangkitan Bangsa), dan lain sebagainya.

Kebangkitan politik Islam secara radikal dan tiba-tiba ini tentu merupakan fenomena yang menarik untuk dicermati. Kadangkala jika tidak arif menilai gerakan Islam ini akan tertuju pada politik negara yang menganggap gerakan ini sebagai gerakan "Islam radikal". Pada hal gerakan Islam ini secara alamiah sebagai akibat ketidakadilan sistem politik sebelum era reformasi dan kegagalan aspek sosial Islam yang tidak teraspirasi kepentingannya oleh negara, serta tatanan sosial yang dikatakan jauh dari nilai Islam di tengah masyarakat mayoritas beragama Islam. Kedua sasaran ini akan coba dikaji dengan pendekatan sejarah sosial Islam.

Dinamika Politik Islam

Di tahun 1990-an perpolitikan Islam di Indonesia memasuki babak baru. Babak baru ini tentunya berbeda dengan perpolitikan Islam pada masa awal pemerintahan Orde Lama ataupun pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Lama, yang melandaskan partai politik sebagai landasan pembangunan, memunculkan berbagai macam partai yang berdasarkan ideologi tertentu. Tidak terkecuali Islam dijadikan ideologi politik formal kenegaraan. Sehingga memunculkan partai politik yang berdasarkan Islam. Pemerintahan Orde Lama beranggapan

bahwa dengan dibangunnya sistem politik akan membawa dampak baik bagi kesetabilan pembangunan dan berdemokrasi.¹

Berbeda dengan sistem perpolitikan masa Orde Baru, bahwa landasan pembangunannya lebih menitikberatkan pada aspek pembangunan, sehingga jargonnya adalah ekonomi sebagai panglima. Partai politik justru dianggap menghambat kemajuan pembangunan bangsa. Sehingga masa Orde Baru mengeluarkan kebijakan yang tidak menitikberatkan pada pembangunan berdasarkan politik.²

Pada masa-masa awal, negara secara ideologis politis mendominasi masyarakat dan kekuatan sosial politik lainnya. Dominasi negara atas masyarakat di awal Orde Baru ditandai dengan kebangkitan negara yang mengungguli masyarakat dan bangsa. Indikasinya dapat ditunjukkan adanya penataan kelembagaan melalui setrategi sosiopolitik, ekonomi dan keamanan yang berlebihan demi mengutamakan kepentingan negara.

Posisi hegemonik ini, ditunjukkan pula dengan kemampuan pemerintah Orde Baru untuk mengembangkan sistem politik yang dapat mengontrol masyarakat sipil, antara lain melalui serangkaian kebijaksanaan politik yang mengarah pada marjinalisasi peran politik. Birokrasi diperkuat, stabilitas dijaga, konflik dieliminasi, dan pengembangan politik memobilisasi massa. Depolitisasi yang sistematis dan kooperatif ini telah berhasil “menjinakkan” kekuatan-kekuatan politik yang radikal. Sehingga kekuatan-kekuatan yang berada di luar birokrat tidak mampu lagi mengembangkan kontrol sosial dan peran kritisnya. Sebaliknya, birokrasi yang mengidentikkan diri sebagai negara, menjadi kekuatan dominan dalam menentukan tujuan politik negara dan pengambilan kebijakan nasional.³

Politik aliran yang berkembang subur pada masa sebelum Orde Baru diberangus sehingga menjadi lemah. Skenario yang dilakukan

¹ Bandingkan dengan Abdul Aziz Thaba yang membagi periodesasi hubungan antara Orde Baru dan Islam politik berdasarkan tiga aksi. *Pertama*, hubungan yang bersifat antagonistik. *Kedua*, hubungan yang bersifat resiprokal-kritis. *Ketiga* hubungan yang bersifat akomodatif. Lihat Abdul Aziz Thaba, *Islam Dan Negara Dalam Politik Orde Baru* (Jakarta; Gema Insani Press, 1996).

² Ridwan Saidi, ”Islam dan Politik di Indonesia Menjelang Akhir Abad ke-20,” dalam *Panji Masyarakat*, No. 624, 21 Rabi’ul Awal 1440 H, September-Oktober 1989, h 50.

³ Lihat kajian yang konprehensif tentang pemunggiran Islam atas negara. M. Rusli Karim, *Negara Dan Peminggiran Islam Politik* (Yogyakarta; Tiara Wacana, 1999)

Orde Baru adalah dengan manuver politik, yakni *pertama*, melalui deideologisasi dan depolitisasi. *Kedua*, kebijakan pengorganisasian massa (*floating mass*). *Ketiga*, diberlakukannya asas tunggal bagi semua kekuatan politik yang ada di Indonesia. Atas dasar inilah, pemerintahan Orde Baru melaksanakan pembangunan yang berorientasikan pada pembangunan selanjutnya.⁴

Pada awal permulaannya, Orde Baru memang merupakan harapan bagi kekuatan-kekuatan politik Islam. Hubungan antara negara dan Islam yang selama Orde Baru penuh dengan kontroversi. Setelah runtuhnya Orde Lama, sejumlah organisasi masa Islam menghendaki rehabilitasi agar Masyumi dapat hidup kembali dengan alasan Soekarno membubarkan Masyumi tanpa alasan yang kuat dan illegal. Awalnya kehendak tersebut kelihatannya memperlihatkan hasil, akan tetapi ternyata usaha untuk menghidupkan kembali Masyumi mendapat tantangan yang kuat dari kalangan militer, kalangan Nasionalis sekuler, serta Kristen/Katolik. Akhirnya ditempuh langkah yang paling moderat, yaitu dengan tidak membentuk atau menghidupkan kembali Partai Masyumi tetapi membentuk partai baru, yakni partai Muslimin Indonesia (Parmusi), sebagai wadah umat Islam, di samping partai Islam yang sudah ada, seperti Nahdlatul Ulama, PSII, dan Persatuan Islam Tarbiyyah Indonesia (PERTI).⁵

Pelarangan menghidupkan kembali partai Masyumi tersebut, nampaknya sangat kontroversial. Bahkan, tokoh-tokoh Masyumi yang akan direkrut oleh partai Parmusi sebagai calon legislatif dalam pemilihan umum pertama dan menggunakan mereka aktif dalam kampanye pemilihan umum, dilarang oleh pemerintah. Sejumlah calon

⁴ Politik aliran dipahami sebagai kebangkitan partai politik berdasarkan agama. Analisa munculnya politik aliran ini berdasarkan pada teori tipologinya Clifford Geertz pada tahun 1950-an, yakni Islam abangan, Islam santri dan Islam priyayi. Untuk selanjutnya lihat misalnya kajian yang dilakukan oleh Imam Tholkhah, *Anatomi Konflik Politik Di Indonesia* (Jakarta; Rajawali Press, 2001).

⁵ Penolakan Angkatan Darat tentang munculnya partai Islam, nampaknya didasarkan pada kekhawatiran akan munculnya ideologi negara berdasarkan Islam yang pernah disuarakan para tokoh Masyumi. Ideologi ini justru merupakan hambatan dari ideologi nasionalis sekuler yang didukung oleh militer. Atau alasan yang lebih signifikan adalah banyaknya aktivis Masyumi yang pernah terlibat pemberontakan senjata sebagai akibat tidak puas dengan pemerintah pusat di masa Orde Lama. Tentang persoalan ini, lebih lengkapnya lihat karya Delier Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional* (Jakarta; Grafiti Press, 1987)

yang dinominasikan dicoret oleh lembaga pemilihan umum.⁶ Sebagai akibatnya, dalam pertarungan antar partai umat Islam terpecah dan tentunya berdampak pada kekalahan partai-partai yang berasas Islam dan berdampak pada kemenangan partai yang didukung pemerintah.

Selanjutnya, realisasinya dari kebijakan-kebijakan kontroversial tersebut, dapat dicernati dari kancah perpolitikan nasional. Depolitisasi dan deideologisasi yang dilakukan setelah Orde Baru mendapat legitimasi yang kuat pada pemilu tahun 1971 dengan kemenangan pemerintah lewat partai Golkar, lambat tapi pasti pemerintah berupaya melakukan politik deideologisasi dan depolitisasi partai-partai. Upaya ini, kemudian direalisasikan dengan penyederhanaan organisasi-organisasi partai politik melalui fusi pada tahun 1973, dari sepuluh menjadi tiga partai, yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang merupakan fusi dari empat partai Islam yang ada, yakni NU, Parmusi, PSII dan PERTI; dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI), fusi dari PNI, Parkindo, Partai Katholik, Murba dan IPKI. Sedangkan Golkar tetap sebagai organisasi politik yang didukung pemerintah.⁷⁸

⁶ Afan Gaffar, "Politik Akomodasi: Islam Dan Negara Di Indonesia," dalam *Prospektif*, No. 4, 1992, h. 68. Nampaknya ada upaya pemerintah untuk menyingkirkan peran politik Islam setelah kehancuran komunis. Kaum militan Islam politik yang dipandang oleh pejabat-pejabat sebagai pendukung negara Islam telah menjadi sasaran pokok kedua dalam represi politik Orde Baru. Kaum militan Islam tidak pernah dibunuh dalam jumlah besar dibandingkan dengan kaum komunis. Namun mereka didiskriminasi, dianiaya, ditangkap dengan tuduhan-tuduhan yang tampaknya lemah dan kadang-kadang diberikan hukuman penjara tanpa alasan yang rasional. Kaum militan Islam disingkirkan di luar pemerintahan dan kehidupan nasional. R. William Liddle, "Skripturalisme Media Dakwah: Sebuah Bentuk Pemikiran dan Aksi Politik Islam di Indonesia masa Orde Baru," dalam Mark R. Woodward (edt.), *Memetakan Paradigma Mutakhir Islam Indonesia* (Bandung; Mizan, 1998), h. 298-299.

⁷ Perolehan pemilu pada tahun 1971 sangat tidak imbang. Kemenangan berada pada partai Golkar yang merupakan partai dukungan pemerintah Orde Baru. Dari hasil akhir perolehan suara pemilu dari berbagai partai yang ada, Golkar mendominasi perolehan suara. Dari ke delapan kontestan pemilu, partai Golkar 62,8%; NU 18,67%; Parmusi 7,365; PNI 6,94%; Parkindo 1,34%; Katholik 1,11%; P.I. Perti 0,70%. Hal ini menunjukkan pada hakekatnya merupakan keabsahan bagi kekuasaan Orde Baru baik dalam artian sistem politik maupun dalam artian pemerintah dan rezim yang berkuasa. Eep Saefulah Fatah, "Pemilu dan Demokrasi: Evaluasi terhadap Pemilu-Pemilu Orde Baru," dalam Seri Penerbitan Studi Politik; *Evaluasi Pemilu Orde Baru, Mengapa 1996-1997 Terjadi Berbagai Kerusuhan?* (Bandung; Mizan, 1997), h. 19.

Setelah berfusinya partai-partai Islam dalam satu partai, Islam pun masih terlibat sebagai ideologi politik. Pada dekade ini, umat Islam dihadapkan satu situasi yang sulit karena secara tidak langsung mengalami pengkotak-kotakan politik. Bahkan aktivitas Islam selalu dicurigai dan diidentikkan dengan aktivitas politik. Kondisi yang demikian yang selanjutnya menimbulkan kecurigaan dan kekhawatiran adanya gerakan frontal Islam bagi kalangan elit birokrat, yang dikenal dengan *Islamic Syndrom*. Apalagi dengan adanya impian Negara Islam yang pernah dimiliki oleh sebagian umat Islam merupakan kekhawatiran yang sangat beralasan. Sehingga ruang gerak umat Islam mengalami keterbatasan dan sangat tidak menguntungkan.

Pada sisi ini, umat Islam yang menyalurkan aspirasinya lewat partai-partai Islam saja merasa dirugikan dengan kebijakan itu, karena dalam kelompok Islam masih membekas perbedaan pada masa lalu dan tidak mungkin untuk diajak bersatu menggalang kekuatan. Ada upaya depolitisasi Islam dilakukan Orde Baru untuk menggeser dan memungkirkan peranan politik Islam dalam pentas elit pemerintahan. Peristiwa ini, membawa dampak Islam tidak mendapatkan tempat yang proporsional dalam proses politik. Islam secara politik ditempatkan dalam posisi pinggiran dan hampir tidak mempunyai akses terhadap pemerintah. Akibatnya, hubungan antara pemerintah dan Islam diwarnai oleh sikap saling mencurigai bahkan antagonis. Sejumlah peristiwa politik yang membawa label Islam mengakibatkan pemerintah menganggap Islam sebagai ancaman.

Keadaan yang demikian itu, sangat disadari justru tidak menguntungkan bagi upaya pembangunan yang digalakkan Orde Baru. Bahkan lebih parah lagi menjadikan umat Islam mengambil sikap oposisi terhadap pemerintah, banyak politisi, tokoh agama, ulama dan intelektual muslim mengambil sikap kritis terhadap pemerintah. Bahkan pada dasawarsa itu umumnya fatwa-fatwa ulama mewajibkan umat Islam memilih partai Islam dalam pemilu. Banyak tokoh Islam mengkritik pemerintah dalam ceramah atau khutbah-khutbah mereka. Di pihak lain, pemerintah membatasi aktivitas da'wah Islam, termasuk membatasi berlakunya keharusan adanya surat izin dari aparat

⁸ Lihat UU No. 3 tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya. Yang menyatakan bahwa “dengan adanya tiga organisasi kekuatan sosial politik tersebut, diharapkan agar partai-partai Politik dan Golongan Karya benar-benar dapat menjamin terpilihnya persatuan dan kekuatan bangsa, stabilitas nasional serta terlaksananya percepatan pembangunan.”

keamanan setempat bagi da'i sebelum penyampaian dakwah. Tentunya ketegangan ini membuat komunikasi antara umat Islam yang mayoritas dengan pemerintah kurang harmonis. Sehingga menimbulkan saling tuding bahwa umat Islam anti Pancasila, anti pembangunan dan anti demokrasi. Sebaliknya dikalangan umat Islam muncul tuduhan dari kalangan umat Islam, bahwa pemerintah cenderung sekuler dan anti Islam. Sebagai dampaknya, pemerintah merasa kesulitan dalam berkomunikasi dengan umat Islam karena tidak ada organisasi Islam yang responsif terhadap pemerintah.

Untuk menanggulangi hal ini, di tahun 1975, pemerintah kemudian melakukan kebijakan dengan membentuk Majelis Ulama Indonesia (MUI). Organisasi ini berfungsi sebagai; *pertama*, memberi fatwa atau nasehat tentang masalah-masalah agama dan sosial. *Kedua*, meningkatkan ukhuwwah Islamiyyah serta memelihara sikap toleran dengan kelompok-kelompok agama lain. *Ketiga*, mewakili umat Islam dalam komunikasi dengan pemeluk agama lain. *Keempat*, bertindak sebagai media komunikasi antara ulama dan pemerintah, dan untuk menerjemahkan orientasi pembangunan pemerintah. Namun demikian, pasca berdirinya MUI pun ketegangan ideologis-politis tidak secara otomatis memudar, ketegangan masih berlangsung sepanjang dasawarsa 1970-an.⁹

Semenjak pemilu pertama peranan partai politik Islam dalam proses politik yang berjalan boleh dikatakan sangat minimal dalam membentuk dan menentukan agenda politik nasional, dan hubungan yang antagonistik sangat terlihat misalnya pada waktu diadakan sidang umum Majelis Permusyawaratan Rakyat pada tahun 1978. Salah satu agenda sidang yang paling kontroversial adalah dimasukkannya aliran kepercayaan. Kalangan pemerintah menghendaki agar aliran kepercayaan dapat dimasukkan dalam agenda garis besar haluan negara. Tentunya kebijakan tersebut mendapat tantangan dari kalangan umat Islam, khususnya yang dipelopori oleh Kyai Yusuf Hasyim dari Nahdlatul Ulama. Alasan utama untuk menolak agenda tersebut adalah dengan dimasukkan aliran kepercayaan dalam GBHN maka berarti

⁹ Lihat Mohammad Atho' Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988* (Jakarta; INIS, 1993). Menurut Atho' pembentukan Majelis Ulama Indonesia dilatar belakangi oleh faktor politik, yakni adanya kesenjangan antara Islam dan negara. Sedangkan peranan MUI dalam masyarakat adalah sebagai lembaga fatwa. Bandingkan pula dengan Delier Noer, *Administrasi Islam di Indonesia* (Jakarta; Rajawali Press, 1983), 141.

pemerintah akan memperlakukan aliran kepercayaan sebagai agama yang sama dengan agma-agama yang sudah ada. Ketika dibicarakan dalam sidang umum MPR, sejumlah anggota MPR dari partai Islam keluar meninggalkan sidang sebagai bentuk protes.

Sejumlah kasus percekcikan kemudian bermunculan di akhir tahun 1970-an sampai pertengahan 1980-an, misalnya kasus komando jihad, masalah boleh tidaknya murid menggunakan jilbab, dan kasus Lampung, yang mempunyai indikasi bahwa sebagian kaum sempalan Islam di Indonesia memilih jalan yang tidak konvensional dalam memperjuangkan aspirasi politik mereka. Hubungan antara Islam dan negara mengarah pada hubungan yang antagonistik bahkan mengarah pada konflik. Demikian juga perdebatan yang kontroversial ketika Pancasila dijadikan isu asas tunggal dalam kehidupan politik, umat Islam merupakan kelompok yang paling vokal menyatakan ketidaksetujuannya.

Menghadapi persoalan yang kurang menguntungkan, sebagai akibat kebijakan pemerintah, maka pemerintah di tahun 1980-an mengubah pola orientasi dari hegemoni kepada pola hubungan yang bersifat akomodatif. Dalam pola ini, telah muncul langkah-langkah untuk saling memahami disertai upaya timbal-balik untuk mengerti posisi dan potensi masing-masing. Negara makin menyadari bahwa umat Islam adalah suatu dominasi politik yang potensial dan bisa diharapkan partisipasinya dalam menukseskan politik pembangunan. Itulah sebabnya ketika birokrasi politik dirasakan tidak sepenuhnya berhasil menjinakkan kekuatan Islam politik, negara melakukan mobilisasi dan rekrutmen politik lewat agama. Pada taraf ini, negara kemudian membentuk organisasi dan lembaga keagamaan yang bisa bernaung dan terkontrol dibawah partai pemerintah.¹⁰

Indikasi aksi mobilisasi dan rekrutmen politik Orde Baru dapat dicermati dengan komitmen pemerintah untuk membantu kepada lembaga-lembaga agama. Semua itu nampaknya dimaksudkan sebagai upaya menyakinkan umat Islam bahwa negara mempunyai komitmen bagi pembangunan dan pengembangan agama. Langkah-langkah ini ternyata cukup efektif dan membawa hasil, yakni memperluas dukungan Islam terhadap negara. Hal ini dibuktikan dengan perolehan suara terhadap partai yang didukung pemerintah meningkat, baik karena

¹⁰ Afan Gaffar, "Islam Dan Politik dalam Era Orde Baru: Menari Bentuk Artikulasi Yang Tepat," dalam *Ulumul Qur'an*, No. 2, Vo. IV, Tahun 1993, h. 21.

tambahan dari organisasi keagamaan yang dibentuknya maupun dari individu atau kelompok umat Islam yang merasa mendapatkan manfaat dari partai pemerintah.¹¹

Di tahun 1980-an terjadi sedikit ketegangan antara negara dan umat Islam sehubungan dengan penerapan Pancasila sebagai satu-satunya asas. Terjadi kekhawatiran dikalangan ormas dan lembaga Islam bahwa negara telah melakukan ofensif ideologis yang mengancam eksistensinya. Berbagai reaksi pun muncul, baik dalam bentuk yang moderat, kritis sampai yang ekstrem.¹² Namun, kemudian kembali negara mengambil inisiatif dengan pernyataan pemerintah bahwa; Pancasila bukan agama dan agama tidak akan dipancasilaikan. Klasifikasi ini berhasil menepis kekhawatiran sementara kalangan Islam yang semula mencurigai negara karena dianggap telah secara ofensif memitoskan ideologi Pancasila melalui P-4 dan Santiaji, selanjutnya negara cukup konsekuensi dalam menempatkan agama dan Pancasila pada posisinya masing-masing.¹³ Maka, tidak mengherankan jika rasionalisasi ideologi Pancasila oleh negara mendapat sambutan dari umat Islam. Dengan demikian, secara ideologis politis, dengan diterimanya Pancasila sebagai asas tunggal telah mengakhiri politik aliran yang muncul di era 1960-an sampai sekarang.

Nampaknya, sikap itu tidak lepas dari kesediaan ormas dan lembaga Islam untuk menerima dan mencantumkan Pancasila sebagai satu-satunya asas ke dalam anggaran dasar organisasinya. Bagi negara kesediaan untuk menerima asas tunggal sangatlah punya makna. Sebab dengan demikian, negara telah mendapatkan legitimasi politik untuk meneruskan pembangunan dengan basis ideologi yang kukuh dan

¹¹ Dari ketiga partai politik, Golongan Karya sebagai partai pemerintah mendapat dukungan hampir mayoritas dari pada partai lainnya, PPP dan PDI. Secara berurutan Golkar di tahun 1982 mendapatkan 60,50% kursi, di tahun 1987 mendapatkan kursi 74,75% dan di tahun 1992 mendapatkan kursi 70,50%. Di susul kemudian PPP mendapatkan kursi 23,50%; 15,25% dan 15,50%, sedangkan PDI mendapatkan 6,00%; 10,00% dan 14,00%.

¹² Untuk lebih jelasnya lihat kajian yang dilakukan oleh Faisal Ima'il, *Islam And Pancasila: Indonesian Politics 1945-1995* (Jakarta; Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, 2001), dalam versi bahasa Indonesia dengan judul *Ideologi, Hegemoni dan Otoritas Agama: Mencari Ketegangan Kreatif Islam dan Pancasila*, penerj. Imam Rosyidi (Yogyakarta; Tiara Wacana, 1999).

¹³ Untuk menetralkan kecurigaan ini kemudian pemerintah mengeluarkan “Pedoman Pelaksanaan P-4 Bagi Umat Islam” yang diterbitkan oleh Pembina Pengalaman Agama (P2A) Pusat Ditjen Bimas Islam Dan Urusan Haji Depag RI di tahun 1993.

seragam, hingga menjadi penopang integrasi nasional. Orde Baru nampaknya menarik pelajaran dari Orde lama, yang selalu larut dalam pertarungan ideologis, pelaksanaan pembangunannya terbengkalai dan terjadi disintegrasi bangsa yang meluas. Bagi umat Islam, adanya jaminan dan bukti nyata bahwa Pancasila tidak mengintervensi agama merupakan alasan tersendiri untuk mendukung negara.

Persoalan lain yang sangat penting untuk dicermati adalah perubahan arah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yang menyadari bahwa umat Islam merupakan kekuatan politik yang sangat potensial kalau mereka mampu mengorganisasi sedemikian rupa. Oleh karena itu pilihan yang ada adalah dua kemungkinan, yakni dengan mengadakan akomodasi terhadap Islam, atau menempatkan umat Islam sebagai kelompok di luar sama sekali. Tampaknya kecenderungan kebijakan pemerintah adalah dengan mengambil pemilihan pertama. Dengan alasan, kalau alternatif kedua yang diambil maka konflik yang paling serius tidak dapat dihindari yang pada akhirnya membawa dampak yang sangat besar dalam proses pemeliharaan negara kesatuan.

Akan tetapi di kalangan Islam justru berkembang pemikiran yang tidak lagi memikirkan politik formal sebagai kendaraan politik. Politikus muslim lebih memandang bahwa aktivitas politik tidak lagi sebagai satu-satunya wadah perjuangan dalam rangka menegakkan Islam dalam kancan bernegara. Gerakan Islam tengah berubah dengan paradigma baru, yakni mengedepankan aspek budaya dari pada aspek politik. Berbagai istilah kunci bermunculan sebagai icon perjuangan mereka yang menandai format baru gerakan mereka. *Pertama*, bergesernya kepemimpinan politik Islam dan maraknya kepemimpinan intelektual Islam yang berbasis di kampus-kampus, majelis ta'lim dan organisasi sosial keagamaan. *Kedua*, adanya transformasi pemahaman keislaman dari sisi fiqhiyah ke arah Islam yang lebih aplikatif, yakni Islam yang dipahami tidak hanya pada aspek konsep akan tetapi lebih pada aspek faktual menyangkut pengentasan kemiskinan, pengembangan ekonomi umat dan pemberdayaan lembaga amil zakat.

Baru di tahun 1998, ketika situasi politik Indonesia mengarah pada krisis multi dimensi yang ditandai dengan jatuhnya rezim Orde baru, kelompok-kelompok Islam bangkit dengan ditandai bermunculannya Islam sebagai landasan ideologi politik. Berbagai persoalan mendasar menyangkut hubungan antara Islam dan negara mulai diungkit-ungkit kembali, misalkan persoalan seperti perlunya pemberlakuan syari'at Islam secara kaffah, isu kekhalifahan Islam,

piagam madinah, perda syari'at Islam dan sebagainya. Isu-isu ini sangat keras didengungkan Istilah-istilah ini menjadi jargon politik dalam rangka untuk mendulang masa dari partai politik tertentu.

Simbolisasi Budaya Politik Islam

Bahasa politik Islam mengindikasikan dedikasi terhadap keagamaan yang merupakan wacana yang berkembang sebagai bentuk ekspresi politik Islam. Penggunaan bahasa agama ke dalam bahasa politik Islam berawal dan bersumber dari sejarah politik Islam di awal-awal munculnya Islam, yakni ekspresi keagamaan dan politik Nabi Muhammad yang selanjutnya diikuti oleh Khulafaurrasyidun. Pelan tapi pasti bahasa ini berkembang dan kemudian memisahkan diri dari bahasa agama. Walaupun demikian, banyak kasus terjadinya hubungan dialektika antara bahasa agama dan politik yang kadangkala sistem dan perilaku politik yang dijalankan tidak selaras dengan prinsip dasar ajaran Islam, tidak jarang penguasa muslim menggunakan dan memanipulasi bahasa politik dengan memberinya muatan aura keagamaan, sehingga penguasa dapat memperoleh dukungan legitimasi dan otoritas keagamaan yang sering dipandang sakral oleh khalayak muslim.¹⁴ Dari kasus inilah yang disebut dengan bahasa politik Islam.

Persoalan yang muncul dalam bahasa politik Islam yang sering digunakan seperti dalam berbagai kasus istilah dan idiom hubungan agama dalam konteks bernegara, jihad, syari'at Islam, piagam madinah, qishah, rajah dan lain sebagainya. Idiom dan politik bahasa agama (bahasa Arab) melekat erat dalam institusi politik masyarakat muslim awal dan menyebar ke berbagai wilayah dunia muslim. Pergulatan bahasa yang menjadi kekuatan legitimasi ini menjadi sangat penting karena dengan bahasa dapat sebagai alat untuk membedakan dan mengenalkan diri. Di kawasan Asia Tenggara, khususnya Indonesia, tidaklah terlalu sulit menemukan berbagai istilah kunci masyarakat muslim dalam mengekspresikan pendapat dalam berpolitik. Berbagai simbol partai dan konsep kebangsaan dapat diketemukan bersamaan kemunculan partai-partai Islam dengan seluruh kekuatan bahasa dan simbolisme politik yang khas.

Misalkan persoalan idiom kata *khalfah* yang tercermin dengan kepala negara dan diberlakukannya syari'at Islam dalam konteks

¹⁴Untuk pembahasan konsep bahasa politik Islam, baca karya Bernard Lewis, Bahasa Politik Islam, penerj., Ihsan Ali-Fauzi (Jakarta; Gramedia, 1994).

bernegara. Istilah tersebut digunakan untuk melegitimasi penguasa muslim, sebagai bentuk kewajiban mengantarkan berlakunya syari'at Islam. Hal ini membawa dampak pada konsep bersatunya agama dan negara. Agama dan negara tidak dapat dipisahkan. Wilayah agama juga meliputi politik. Menurut konsep ini negara merupakan lembaga politik dan sekaligus keagamaan.

Argumen penyatuan agama dan negara ini terlegitimasi dari sejarah Islam awal yang masih dipakai dalam konsep modern. Fakta sejarah bahwa setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, Nabi membangun satu bentuk negara kota di Madinah. Dipertahakannya sistem kekhalifahan juga didasarkan atas keyakinan bahwa kekuasaan agama dan politik harus digabung dalam satu atap. Dengan kata lain, sejak berdirinya negara Madinah yang memiliki konstitusi tertulis pertama di dunia, Nabi Muhammad bertindak sebagai kepala negara juga menjalankan syariat Islam terhadap seluruh warga negara. Islam bersifat spiritual sekaligus temporal dan sekaligus negara. Islam memberikan pandangan dunia dan kerangka makan bagi hidup individu maupun masyarakat.

Simbolisasi bahasa politik

Islam tersebut telah menjadi budaya politik Islam tanpa adanya kritik sejarah. Apakah konsep khalifah dengan berbagai makna idiomatiknya sudah menjadi bahasa baku dalam sistem ketatanegaraan? Pada hal fakta sejarah menunjukkan sistem khalifah yang dianut pada masa perkembangan Islam, khususnya setelah *khulafaurrasyidin*, berubah menjadi sistem monarki. Fakta inilah yang menyebabkan munculnya kebingungan dan tidak adanya konsensus mengenai bagaimana konsep ketatanegaraan negara Islam.

Bahasa politik Islam lain yang muncul dalam kancang perpolitikan di Indonesia adalah tentang pemberlakuan syari'ah Islam. Istilah syari'ah Islam adalah idiom agama yang telah terbakukan dan mempunyai makna pemberlakuan hukum-hukum Islam dalam kancang publik. Aspek norma hukum syari'ah mengedepankan hukum absolut yang sudah tertera dalam hukum Islam yang baku.

Dari paparan itu, makna syari'ah juga tidak mengalami perubahan. Sebetulnya kecenderungan syariah dipahami sebagai hukum perundang-undangan karena kata syari'ah dalam kamus Islam telah mengalami perubahan makna berkali-kali. Mula-mula pengertian syari'ah merujuk makna aslinya, yakni *manhajullah*, *sabilullah* dan *thariqullah*. Kemudian meluas hingga mencakup makna kaidah-kaidah perundang-undangan, *tasyri'iyyah*, kemudian mengalami pergeseran

hingga mencakup pengertian-pengertian tafsir, ijtihad, pendapat, dan fatwa.

Pada awal Islam konsep syari'ah lebih bersifat moral ketimbang hukum. Ahkam dalam periode awal Islam merupakan sebuah perintah Ilahi yang menjadi kewajiban secara moral yang bersifat pribadi. Istilah syari'ah baru digunakan dalam pengertian hukum setelah tahun ke delapan hijriyah. Pada wilayah ini, syari'ah tidak sepenuhnya bersifat Ilahiyah dan tetap dapat berubah. Karena syariah tercipta secara langsung. Syariah berkembang melalui proses evolusi selama berabad-abad. Sehingga syariah tidak pernah statis. Proses ijtihad yang berkesinambungan merupakan keharusan penggalian hukum sebagai interpretasi yang kreatif dan aplikasi fiqh Islam dalam situasi yang baru.

P e n u t u p

Persoalan bahasa adalah cermin pemahaman pemakai bahasa tentang kebudayaannya. Perkembangan bahasa sangat dipengaruhi oleh perubahan sosio-kulturalnya. Begitu juga dalam perubahan bahasa politik Islam berkaitan erat dengan perkembangan dan perubahan politik di kalangan masyarakat Islam. Namun, perubahan bahasa politik Islam tampaknya sangat lambat dan cenderung tidak mengalami perubahan makna dan konsepnya. Hal ini terjadi karena konsep bahasa politik Islam dianggap sakral dan tidak ada celah ruang interpretasi dengan pendekatan interdisipliner keilmuan.

Sebenarnya tidak ada yang salah dalam menggunakan ideom-ideom bahasa dalam politik Islam, akan tetapi jika tidak disadari akan menimbulkan pelaksanaan yang seringkali malah menimbulkan konflik. Karena Islam diyakini menyediakan sistem simbol mobilisasi politik yang efektif untuk mempertahankan diri maupun melawan sebuah pemerintahan yang tidak manusiawi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Thaba, *Islam Dan Negara Dalam Politik Orde Baru*, Jakarta; Gema Insani Press, 1996.
- Afan Gaffar, "Politik Akomodasi: Islam Dan Negara Di Indonesia," dalam *Prospektif*, No. 4, 1992.
- Afan Gaffar, "Islam Dan Politik dalam Era Orde Baru: Menari Bentuk Artikulasi Yang Tepat," dalam *Ulumul Qur'an*, No. 2, Vo. IV, Tahun 1993.
- Bernard Lewis, Bahasa Politik Islam, penerj., Ihsan Ali-Fauzi, Jakarta; Gramedia, 1994.
- Delier Noer, *Administrasi Islam di Indonesia*, Jakarta; Rajawali Press, 1983.
- Delier Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional*, Jakarta; Grafiti Press, 1987.
- Eep Saefullah Fatah, "Pemilu dan Demokrasi: Evaluasi terhadap Pemilu-Pemilu Orde Baru," dalam Seri Penerbitan Studi Politik; *Evaluasi Pemilu Orde Baru, Mengapa 1996-1997 Terjadi Berbagai Kerusuhan?*, Bandung; Mizan, 1997.
- Faisal Ima'il, *Islam And Pancasila: Indonesian Politics 1945-1995*, Jakarta; Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, 2001. *Ideologi, Hegemoni dan Otoritas Agama: Mencari Ketegangan Kreatif Islam dan Pancasila*, penerj. Imam Rosyidi, Yogyakarta; Tiara Wacana, 1999.
- Imam Tholkhah, *Anatomi Konflik Politik Di Indonesia*, Jakarta; Rajawali Press, 2001.
- M. Rusli Karim, *Negara Dan Pemunggiran Islam Politik*, Yogyakarta; Tiara Wacana, 1999.
- Mohammad Atho' Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*, Jakarta; INIS, 1993.
- R. William Liddle, "Skipturalisme Media Dakwah: Sebuah Bentuk Pemikiran dan Aksi Politik Islam di Indonesia masa Orde Baru," dalam Mark R. Woodward (edt.), *Memetakan Paradigma Mutakhir Islam Indonesia*, Bandung; Mizan, 1998.
- Ridwan Saidi, "Islam dan Politik di Indonesia Menjelang Akhir Abad ke-20," dalam *Panji Masyarakat*, No. 624, 21 Rabi'ul Awal 1440 H, September-Okttober 1989.
- UU No. 3 tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya